

KOTA SETENGAH HATI DI SELATAN JAKARTA: DEPOK 1970-1990an

Tri Wahyuning M. M. Irsyam

Universitas Indonesia

Tujuan penelitian berjudul “Kota Setengah Hati Di Selatan Jakarta: Depok 1976-1999” adalah untuk mengetahui faktor-faktor kausatif dari perubahan dan permasalahan yang ada di kota Depok sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dan perkembangan-perkembangan lainnya. Istilah kota mandiri dalam artikel ini diartikan sebagai suatu kota yang secara ekonomis dan secara fisik memiliki kemandirian, tidak tergantung pada kota lainnya, serta mampu berperan sebagai pusat pengembangan dari suatu wilayah, dan penduduknya bermukim serta berkiprah di dalam kota itu sendiri (Djoko Suyarto: 2003, 355-356). Proses perkembangan Depok menuju kota mandiri, ditentukan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ketersediaan kesempatan kerja dan lapangan kerja baru. Banyaknya penglaju yang setiap hari ke Jakarta untuk bekerja, sekolah, atau tujuan lain menunjukkan bahwa Depok masih tergantung pada kota induknya, Jakarta.

Depok Dalam Sistem Jabo(de)tabek

Depok tidak memiliki sumberdaya alam mineral, akan tetapi posisinya sangat strategis, berbatasan langsung dengan Jakarta menjadikan Depok dimasukkan dalam rencana pengembangan Jabo(de)tabek. Ketika Depok dirancang menjadi satelitnya Jakarta, sebenarnya kota ini hanya dijadikan sebagai kota tempat tinggal (*dormitory town*) bagi penduduk Jakarta. Sejalan dengan hal tersebut Cosmas Batubara mengatakan bahwa Depok memang direncanakan hanya untuk tempat beristirahat bagi penghuni Perumnas, sementara pekerjaan sehari-hari tetap berada di Jakarta.

Pada saat ditetapkan sebagai Kotamadya pada 1999, kota baru ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan warganya dari segala segi. Namun dalam kenyataannya, hingga saat ini

Depok masih belum dapat melepaskan diri dari kota Jakarta. Hal ini terjadi karena peran yang diberikan kepada kota ini adalah untuk menampung kelebihan penduduk Jakarta, yang mempunyai pekerjaan tetap di tempat asalnya. Dengan demikian, Depok baru pada sebatas menampung penduduk Jakarta, tanpa penyediaan fasilitas pekerjaan. Para migran ini setiap hari pulang pergi dari Depok-Jakarta, dan sebaliknya. Ida Bagoes Mantra menyebut mobilitas penduduk tersebut sebagai *penglaju*. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk Depok yang bekerja di Depok dan yang bekerja di Jakarta pada tahun 1982 dan 1987.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Depok Berdasarkan Lokasi Pekerjaan (1982 dan 1987)

Tahun	Lokasi Tempat Kerja		
	Kotif Depok	DKI Jakarta dll	Jumlah
1982	27.127	46.434	73.561
1987	43.582	45.043	88.625

(Sumber: BKSP Jabotabek, Studi Pengembangan Lingkungan Permukiman Depok, 1982; Lihat juga DTKTD, RUTRK Depok, Buku Kompilasi Data, 1987).

Penurunan jumlah penduduk yang bekerja di Jakarta, yang tergambar pada tabel tersebut antara lain terjadi karena pemindahan kampus UI ke Depok pada 1987. Dengan kepindahan UI ke Depok para karyawan dan para pengajar yang telah membeli rumah di Perumnas Depok I, dengan sendirinya tidak lagi melakukan perjalanan ulang-alik ke Jakarta. Sebagian besar penghuni Depok yang merupakan pindahan dari Jakarta adalah pegawai negeri yang bekerja di Jakarta. Perpindahan mereka ke Depok bukan disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan persoalan permukiman. Para pendatang yang menempati kompleks Perumnas sebagian besar pindah ke Depok karena mencari tempat tinggal yang murah dalam arti sesuai dengan kemampuan, dan dekat dengan tempat kerja. Dapat dikatakan bahwa Depok hanya menjadi tempat “titipan” menginap bagi mereka, karena mereka telah mempunyai pekerjaan tetap di Jakarta.

Tabel 2 menunjukkan bahwa hingga tahun 1982, belum tersedia lapangan kerja bagi pegawai negeri. Mengingat bahwa Depok adalah desa yang agraris, maka jumlah pekerjaan sebagai petani cukup besar. Meskipun dalam tabel ditunjukkan bahwa pekerjaan sebagai buruh jumlahnya lebih besar daripada petani, hal ini diasumsikan bahwa sebahagian dari mereka, pada awalnya juga berprofesi sebagai petani, namun ketika terjadi pembangunan proyek Perumnas secara besar-besaran, lahan pertanian mereka terkena penggusuran. Kenyataan ini menjadikan mereka berubah ke bidang non pertanian, seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tempat Kerja (Depok dan Jakarta 1982)

Jenis Pekerjaan	Jakarta	Depok
Non Agraris		
Pegawai Negeri	31.184	-
Buruh	8.000	8.287
Pedagang	3.000	6.676

Tukang	750	663
Jasa	3.500	3.526
Industri Kecil/home industri	-	197
Agraris		
Petani, pemilik, penggarap, buruh tani	-	7.777
Jumlah	46.434	27.127

Sumber: BKSP Jabotabek, *Studi Pengembangan Lingkungan Pemukiman Depok*, 1982, hlm. 130-132.

Dari Tabel 2 juga ditunjukkan bahwa komposisi jenis pekerjaan penduduk Depok yang bekerja di Jakarta dan yang bekerja di Depok sangat berbeda. Secara umum dapat dikatakan bahwa pekerjaan sebagai pegawai negeri tampak kurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Realitas ini menunjukkan bahwa Jakarta mempunyai kemampuan yang besar untuk menampung tenaga kerja dari berbagai golongan dan keahlian. Sementara potensi ini tidak dimiliki oleh Depok. Hal ini merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam menciptakan kegiatan ulang-alik Depok-Jakarta-Depok.

Faktor geografis juga memicu lambannya kemandirian Depok, karena kedekatan jarak antara Depok dan Jakarta ditambah dengan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum yang semakin membaik menyebabkan kemudahan aksesibilitas antara kedua kota itu. Namun di lain pihak, fasilitas perkotaan yang ada di Depok kurang lengkap dan kurang menarik dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di Jakarta menyebabkan warga memilih melakukan perjalanan pulang pergi setiap hari. Hal yang sama berlaku juga pada para mahasiswa yang lebih memilih tinggal di Jakarta dari pada harus tinggal di kamar kos.

Ketika Depok pada 1981 peran dan statusnya berubah menjadi Kota Administrasi, maka sejumlah fasilitas perkotaan juga mulai ditata kembali. Kehadiran UI secara tidak langsung juga berdampak pada peningkatan penyediaan fasilitas pekerjaan di bidang perdagangan (antara lain warung makan atau restoran), dan jasa kemasyarakatan (*Kompas*, 25 Mei 1987).

Terbentuknya Kotif Depok pada 1981 juga memerlukan sejumlah jasa kemasyarakatan seperti PNS yang bekerja di dinas pemerintahan (Depok), dan Hankam /ABRI, perbankan dan jasa keuangan lain serta industri. Jasa kemasyarakatan itu mulai muncul di Depok, antara tahun 1982-1987 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Pertambahan Jumlah Usaha di Kotif Depok (1982 - 1987)

Bidang	Jumlah Pertambahan Usaha (unit)
Industri	22
Listrik, gas, air minum	4
Perdagangan, rumah makan, penginapan	87
Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	11
Jasa Kemasyarakatan	32

(Sumber: Kantor Pemerintah Kotif Depok, *Pendaftaran Ulang dan Izin Baru di Kotif Depok Tahun 1982-1987*).

Jumlah pertambahan usaha di bidang perdagangan menunjukkan jumlah yang besar dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Namun kesempatan kerja yang ada pada bidang-bidang tersebut hanya sebatas pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas, atau di bawahnya. Untuk rumah makan misalnya, tenaga kerja yang direkrut adalah sebatas untuk pelayan, demikian juga

penginapan. Artinya kesempatan kerja yang ada, tidak terlalu mengandalkan ketrampilan khusus. Sementara, bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebanyakan penduduk Depok adalah jasa di bidang pemerintahan dan perusahaan.

Dalam hal ini, Depok dikondisikan hanya sebatas sebagai tempat permukiman. Artinya, menurut pemerintah Jakarta, di Depok tidak perlu ada kegiatan industri besar. Kenyataan ini didukung dengan adanya larangan dan pembatasan untuk industri besar dan menengah, yang dituangkan dalam Keppres No. 21 Tahun 1989. Realisasi dari Keppres ini, nampak pada tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk memajukan industri yang telah ada di Depok. Menanggapi hal ini Badrul Kamal menyatakan bahwa di dalam pemerintahan Kota Depok, tidak terdapat subdinis atau bagian industri yang mengkoordinasi industri-industri yang ada di Depok. Kondisi Depok yang serba terbatas menyebabkan penduduk memilih menjadi *penglaju* ke kota metropolitan Jakarta, untuk mencukupi kebutuhannya.

Ulang alik tidak hanya dilakukan oleh pengajar dan karyawan UI saja, tetapi juga dari kalangan pegawai negeri yang bekerja di kementerian atau BUMN. Menurut catatan Boy Loen, kaum *Belanda Depok* juga banyak yang bekerja di dunia perbankan di Jakarta. Mereka dapat dikatakan termasuk dalam migran sirkuler Depok – Jakarta seperti yang dikatakan oleh Ida Bagus Mantra. Perjalanan ulang-alik dari pegawai kementerian, atau Badan-badan usaha lebih disebabkan karena kepindahan mereka ke Depok tidak disertai dengan perpindahan tempat kerjanya. Di Depok belum ada kantor wilayah dari kementerian atau badan-badan usaha tersebut, sehingga mereka tetap melakukan perjalanan pulang pergi dari Depok ke Jakarta.

Pemerintah Kota Depok juga telah berupaya untuk menyediakan lapangan kerja dan tempat usaha di Depok. Upaya yang dilakukan dengan tujuan sebagai daya tarik bagi para urban, dan mengurangi perjalanan ulang alik antara Depok – Jakarta. Dengan demikian diharapkan ketergantungan pada kota induknya dapat dikurangi (Gideon Golany, 1976: 128). Namun dalam kenyataannya hal tersebut belum dapat dicapai sepenuhnya.

Pengembangan ekonomi di kota Depok direncanakan dikembangkan sektor perdagangan dan jasa, juga di sektor industri, sementara sektor pertanian peranannya untuk menyerap tenaga kerja semakin berkurang. Pengurangan lahan pertanian itu antara lain disebabkan adanya pembangunan perumahan secara besar-besaran dan fungsi-fungsi lain. Pada beberapa daerah di kecamatan Beji yang terletak di sekitar kampus UI, banyak penduduk Depok yang mengubah fungsi lahannya dari pertanian menjadi tempat pondokan atau menjual lahannya kepada pengusaha/ penduduk Jakarta untuk dibangun pondokan atau usaha lain.

Kemandirian Setengah Hati

Sebagai Kotamadya, status Depok secara administrasi sebenarnya merupakan kota mandiri bagian dari Propinsi Jawa Barat. Namun dalam realitasnya” Depok menjadi bagian dari megapolitanisasi Jakarta. Posisi Depok yang demikian akan senantiasa membuat Depok sulit mandiri, dan tetap tergantung pada kota megapolitan Jakarta.

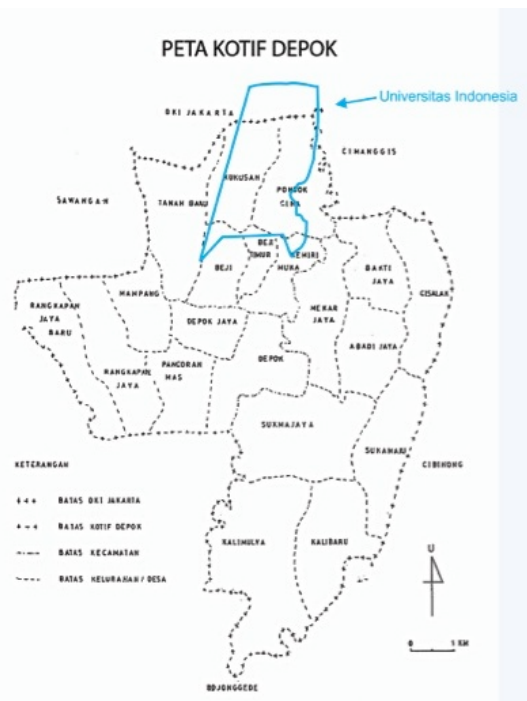
Dalam rencana wilayah metropolitan Jabo(de)tabek, Depok belum sepenuhnya berhasil menjadi salah satu *counter magnet* dari Jakarta. Depok baru berhasil dalam hal menarik penduduk Jakarta untuk tinggal di wilayahnya, namun belum berhasil menarik kegiatan para pendatang untuk bekerja di Depok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Depok hanya sebagai pendukung yang melayani kota Jakarta, yaitu menyediakan tempat tinggal dan tenaga kerja. Depok merupakan bagian dari realitas Jabo(de)tabek. Kota-kota tersebut merupakan sebuah entitas yang saling berhubungan dalam berbagai dimensi. Baik dimensi ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Mudah dimaklumi bila apa yang terjadi di Jakarta, akan terjadi juga

di Depok, karena kota ini terlalu berorientasi pada Jakarta. Ditambah lagi dengan sebagian besar warganya adalah merupakan warga yang berasal dari DKI Jakarta, maka dalam menata kotanya Depok seolah “menduplikasi” Jakarta. Seperti kota satelit lainnya, Depok masih tergantung pada orbitnya, Jakarta.

Kehadiran kampus Universitas Indonesia di Depok, membuat Depok disebut-sebut sebagai kota pendidikan. Di satu pihak UI secara tidak langsung telah mengubah tata ruang Depok menjadi tata uang. Masyarakat Depok berubah dari masyarakat agraris menjadi masyarakat non agraris. Namun di pihak lain pengaruh kehadiran UI secara langsung terhadap kegiatan sosial dan ekonomi di kota Depok dapat dikatakan tidak signifikan. Beberapa kasus berikut ini menunjukkan bahwa kehadiran Universitas Indonesia merupakan aspek politis yang menjadikan kemandirian setengah hati.

I. Aspek Geografis

Kampus Universitas Indonesia berdiri diatas lahan seluas kurang lebih 325 hektar. Secara fisik Kampus UI terletak di dua lahan, yaitu propinsi Jawa Barat (250 ha) dan propinsi DKI Jakarta (75 ha). Peta berikut menunjukkan letak UI dalam wilayah Depok. Pada peta tersebut dapat dilihat bahwa UI terletak di daerah kantong dalam wilayah Depok dengan karakteristik Jakarta. Seperti halnya kelebihan penduduk dari Jakarta yang harus ditampung oleh kota Depok. UI juga merupakan titipan Jakarta, yang berfungsi untuk melengkapi jenjang pendidikan bagi orang-orang Jakarta yang tinggal di Depok. Karakteristik Jakarta tetap disandang oleh UI karena meskipun secara fisik UI berada di Depok, namun secara administratif UI tetap berkedudukan di Jakarta. Mengenai hal ini dapat dilihat pada peta berikut ini.



Peta Letak UI di Kota Depok. (Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1988).

Aspek lain dari segi geografis yang menjadi salah satu penyebab yang menjadikan Jakarta terus membayangi kehidupan penghuni Depok, “titipan” Jakarta adalah masalah kurikulum sekolah. Dalam kurikulum nasional ada tuntutan bahwa masing-masing wilayah harus diajarkan muatan lokal, seperti mata pelajaran bahasa daerah atau kebudayaan setempat. Di Depok, mata pelajaran muatan lokalnya adalah bahasa Sunda, karena secara geografis Depok berada di Propinsi Jawa Barat. Situasi ini, menyulitkan para orangtua. Mereka tidak paham dengan bahasa Sunda, akibatnya mereka tidak dapat membantu mengajari anak-anaknya ketika ada pekerjaan rumah bahasa Sunda. Hal tersebut tidak ditemui di Jakarta yang sifatnya lebih multikultural. Dalam keadaan seperti itu, mereka kemudian lebih memilih untuk tetap menyekolahkan anaknya di Jakarta.

2. Aspek Politis

Dari segi politis, pemerintah pun tidak berupaya untuk memindahkan kedudukan UI yang secara fisik hampir 85% sudah pindah ke Depok. Pada tahun ajaran 2012/2013 Fakultas Kedokteran Gigi, sudah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kampus Depok. Peraturan Pemerintah No. 68/2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, pada bab II pasal 5 menyebutkan: Universitas Indonesia berkedudukan di Jakarta. Realitas ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak 100% meng”ikhlas”kan UI secara utuh berada di Depok. Ketidakhikhlasan ini lebih disebabkan karena Jakarta tidak lagi mempunyai Universitas Negeri yang besar.

3. Aspek Psikologis

Kenyataan lain yang menunjukkan “keengganan” mereka untuk mengakui dirinya sebagai warga Depok nampak kepemilikan KTP. Warga “titipan Jakarta “ yang bermukim di Depok tetap menggunakan KTP Jakarta. Beberapa alasan dikemukakan oleh mereka yang tetap ber KTP Jakarta meskipun berdomisili di Depok. Realitas ini nampaknya sudah mengejala pada masyarakat Jakarta yang pindah ke Depok. Alasan yang disampaikan lebih ke alasan administratif dan kenyamanan fasilitas yang diperoleh ketika menjadi pemegang KTP Jakarta. Dengan kata lain hak dan fasilitas sebagai pemegang KTP Jakarta, lebih aman. Fasilitas kesehatan di Jakarta, misalnya lebih baik dan lebih lengkap dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang ada di Depok. Fasilitas kesehatan untuk warga yang menggunakan BPJS atau Askes, lebih banyak pilihan di Jakarta.

4. Aspek Ekonomis

Penyerapan tenaga kerja masyarakat Depok oleh Kampus UI juga sangat kecil. Kecilnya jumlah pegawai baru yang berdomisili di Depok yang dapat diterima oleh UI karena tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam penerimaan pegawai di Universitas Indonesia belum dapat dipenuhi. Pada 1982, dengan jumlah penduduk Depok sebanyak 223.649 jiwa, fasilitas pendidikan yang ada di Depok baru ada 19 unit Sekolah SMA untuk tiga kecamatan yaitu Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Sukmajaya Dengan demikian ada kemungkinan jumlah pelamar untuk menjadi pegawai UI kebanyakan berijazah SMP. Kenyataan menyebabkan penduduk Depok yang melamar pekerjaan sebagai pegawai baru Universitas Indonesia, banyak yang tidak lolos. Hal ini ditunjukkan dalam Tabel 4 berikut ini,

Tabel 4. Jumlah dan Lokasi Tempat Tinggal Pegawai Baru Universitas Indonesia (1987-1989)

No	Jenis Pegawai Baru	Lokasi Tempat Tinggal Ketika Mendaftar		
		Kotif Depok	DKI Jakarta	Total
1	Pegawai Administrasi	27	167	194
2	Pegawai Non Administrasi	8	214	222
	Jumlah	35	381	416

Sumber: Subbagian Pengembangan Pegawai Universitas Indonesia, Agenda Pengangkatan Pegawai Baru UI, 1989).

Dari tabel 4 tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan menjadi syarat utama untuk menjadi pegawai di Universitas Indonesia. Untuk pegawai Administrasi, UI menuntut minimal pendidikan lulusan SMA, sementara untuk pegawai non administrasi, diperlukan jenjang Strata-I (Sarjana), atau lebih tinggi lagi. Senada dengan kasus tersebut, Hawigheerst menyatakan bahwa salah satu fungsi pendidikan adalah sebagai mekanisme seleksi dalam menjaring dan menempatkan orang pada posisi-posisi yang ada di masyarakat. Pendidikan dalam hal ini dapat meningkatkan derajat mobilitas dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa tingkat rendahnya status pekerjaan seseorang sangat tergantung pada tingkat pendidikan yang dicapainya (Robert J. Hawigheerst, 1953:67-70).

Anderson mengatakan bahwa pendidikan (dalam hal ini sekolah) bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi mobilitas yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mempengaruhi mobilitas untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan karena kualifikasi pekerjaan tidak hanya dipenuhi oleh sekolah formal saja (C. Arnold Anderson, 1961: 560-570). Jaringan sosial juga berpengaruh pada mobilitas vertikal. Peluang kerja bagi anak-anak dengan latar belakang keluarga berstatus rendah lebih kecil kesempatannya untuk dapat menduduki posisi atas dengan penghasilan tinggi.

Penutup

Dalam rencana besar kota megapolitan Jakarta, Depok tidak pernah dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan baru. Depok adalah kota setengah hati yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan sekunder dengan pusat pertumbuhan utama berada di Bogor. Sementara tiga kota satelit lain di sekitar Jakarta, yaitu Tangerang, Bekasi, dan Bogor, dirancang sebagai pusat pertumbuhan utama. Akibatnya, Depok juga tidak dihadirkan dalam terminologi Jabotabek, yang direalisasikan pada tahun 1975. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sejak awal Depok telah tereksklusi dari rencana besar kota megapolitan Jakarta. Ketika Depok terinklusi kembali ke wilayah Jakarta, Depok hanya dikembangkan dan direncanakan untuk kepentingan Jakarta. Kedekatan jarak, dan letak Depok yang strategis, berbatasan dengan Jakarta, mampu mencitrakan Depok menyatu dengan Jakarta dan semakin “jauh” dari pusat administrasinya di Propinsi Jawa Barat, (Bogor). Namun hal ini berimplikasi pada semakin dalam keterjebakannya

dalam permasalahan Jakarta, dan semakin sulit untuk mencapai kemandiriannya sebagai pusat perkembangan baru.

Depok hanyalah ruang kota yang dimanfaatkan untuk kepentingan Jakarta. Di satu sisi, Jakarta menginginkan Depok menjadi kota mandiri, namun kemandirian tersebut tidak menjadi beban Jakarta. Di lain pihak pemerintah Jakarta tidak menginginkan perkembangan penduduk Depok berbalik menjadi beban Jakarta seperti halnya yang terjadi dengan kota satelit Kebayoran. Jakarta telah menjadikan Depok sebagai kota setengah hati, yang selalu tergantung pada kota induknya.

Daftar Pustaka

- Anderson, C. Arnold, “ A skeptical Note on The Relation of Vertical Mobility to Education,” dalam *American Jurnal of Sociology*, Vol. 66, No. 6, May 1961
- BKSP Jabotabek, *Studi Pengembangan Lingkungan Pemukiman Depok*, 1982
- Golany, Gideon. *New Town Planning: Principles and Practise*, New York: John Wiley and Sons, 1976
- Hawigheerst, Robert J. *Human Development and Education*, (New York: Longmans Green, 1953
- Mantra, Ida Bagus, *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Suyarto, Djoko “Pengembangan Kota Baru di Indonesia” dalam *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 Konsep dan Pendekatan Pembangunan perkotaan di Indonesia*, Yayasan Sugiyanto Soegiyoko, Urban and Regional Development Institute-Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia. *Kompas*, 25 Mei 1987.

Wawancara

- Badrul Kamal, mantan Walikota Depok, 21 April, 2004
- Boy Loen, keturunan “Belanda Depok”, YLCC, Depok, 17 September 2011
- Cosmas Batubara, Jakarta Pusat, 9 Juni 2011.